

AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN DITINJAU DARI PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN, SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Ika Agustina¹, Kartika Hendra Titisari², Bambang Mursito³

^{1,2,3}Program Studi Magister Ilmu Manajemen, Universitas Islam Batik Surakarta, Surakarta

e-mail: agustina.ika.85@gmail.com, kartikatitisari@gmail.com, bambangmursito1959@gmail.com

Diterima: 29-06-2024 Disetujui: 30-07-2024

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penyajian laporan keuangan, sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia, dan teknologi informasi terhadap akuntabilitas laporan keuangan di Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Metode penelitian yaitu survey yang dilakukan kepada 66 responden. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan, sistem akuntansi, sumber daya manusia, teknologi informasi yang baik dapat meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi organisasi sektor publik agar dapat memprioritaskan investasi dalam pengembangan sistem akuntansi keuangan yang baik dan integratif. Hal ini mencakup pembaruan teknologi informasi dan penyediaan pelatihan untuk karyawan dalam menggunakan sistem tersebut. Selain itu, manajemen perlu memberikan dukungan dan insentif bagi karyawan yang berusaha meningkatkan kompetensi mereka dalam bidang akuntansi dan teknologi informasi.

Kata kunci: Akuntabilitas; Laporan Keuangan; Sistem Akuntansi; Sumber Daya Manusia; Teknologi Informasi

Abstract

This study aims to analyze the influence of financial report presentation, regional financial accounting system, human resource competence, and information technology on financial report accountability at Health Office of Surakarta City. The research method was a survey conducted to 66 respondents. Data analysis was carried out using multiple linear regression. The results of the study show that the presentation of financial statements, accounting systems, human resources, and information technology can improve the accountability of financial statements. This research contributes to the management of the health office so that it can prioritize investment in the development of a good and integrative financial accounting system. This includes updating information technology, improving infrastructure, and providing training for employees in using the system. In addition, management needs to provide support and incentives for employees who are trying to improve their competence in the field of accounting and information technology.

Keywords : *Accountability; Financial Statements; Accounting System; Human Resources Information Technology*

Pendahuluan

Pemerintah daerah dengan adanya otonomi daerah memiliki wewenang dapat mengurus pemerintahannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang menjadi salah satu tolak ukur kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah adalah dilihat dari aspek kinerja keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik harus berdasarkan prinsip akuntabilitas sehingga pengelolaan uang yang dibelanjakan dapat efisien, efektif, dan ekonomis (Jesni et al., 2022). Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Mewujudkan laporan keuangan yang akuntabel menuntut pemerintah menyusun serta menyajikan laporan keuangan publiknya sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) No. 01 (Azizah & Anik, 2023). Urgensi akuntabilitas dalam pelaporan keuangan tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap standar tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat dalam kegiatan dan inisiatif yang dilaksanakan (Kornitasari, 2023).

Fenomena pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia adalah topik yang menarik untuk diteliti lebih mendalam. Berdasarkan artikel yang dipublikasikan oleh Sukran et al. (2020), Firmansyah et al. (2022), dan Bangsawan & Abbas (2021), masih banyak ditemukan bahwa pemerintah daerah belum menerapkan standar akuntansi pemerintahan yang baik. Selain itu, banyak penyimpangan yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan selama pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah. Hal ini seperti yang dicontohkan dalam berita online Antara (Nasution, 2019) yang memberitakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan sejumlah temuan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Barat, seperti pertanggungjawaban perjalanan dinas yang tidak sesuai ketentuan, kelebihan pembayaran tunjangan profesi guru, dan denda keterlambatan atas belanja modal gedung dan bangunan. Temuan kepatuhan tersebut diiringi dengan temuan terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI), termasuk potensi penerimaan yang belum dikelola maksimal, kesalahan setoran penerimaan di RSUD Solok, serta pencatatan aset yang belum memadai.

Fenomena laporan keuangan pemerintah yang belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan serta banyaknya penyimpangan yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam audit laporan keuangan pemerintah telah meningkatkan tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang baik (*good governance*). Hal ini juga mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik (Rante et al., 2018).

Salah satu indikator akuntabilitas adalah penyajian dari laporan keuangan (Dewi, 2023). Laporan keuangan pada hakekatnya ialah hasil dari proses akuntansi yang bisa dipergunakan untuk media komunikasi antara data atau kegiatan keuangan dalam suatu perusahaan dengan pihak yang berkepentingan terhadap data atau kegiatan keuangan tersebut atau operasi perusahaan (Ohoiwai et al., 2022). Sementara Pandaleke et al. (2022) menyatakan tujuan laporan keuangan atau manajemen keuangan adalah untuk melaporkan perubahan kinerja bisnis dan posisi keuangan sesuai dengan total prinsip akuntansi yang diterapkan. Laporan keuangan tahunan bekerja untuk mengetahui perkembangan bisnis yang sukses.

Untuk mengukur kualitas laporan keuangan diperlukan pemeriksaan yang komprehensif dan berkala. Badan Pemeriksa Keuangan akan memeriksa laporan keuangan pada setiap periode pelaporan dan memberikan opini mengenai gambaran kualitas atau kewajaran laporan keuangan tersebut. Ada empat jenis opini yang dikemukakan oleh BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Pendapat Tidak Wajar, serta Tidak Memberikan Pendapat (Wonar, 2022). Peningkatan akuntabilitas instansi pemerintah dapat dilakukan dengan pemantauan kualitas pelaporan keuangan yang optimal dan tepat sehingga pekerjaan pemerintah optimal. Selain itu, untuk melaksanakan praktik

pemberantasan korupsi untuk mewujudkan *good governance* di tingkat pusat maupun daerah (Paramayana et al., 2022).

Faktor lain yang turut berkontribusi dalam akuntabilitas pelaporan keuangan adalah sistem akuntansi keuangan daerah. Molle, Manafe, & Perseveranda (2023) menyatakan sistem akuntansi keuangan daerah merupakan rangkaian tata cara konvensional atau secara komputerisasi dengan mengumpulkan data, mencari, menyimpulkan, hingga melaporkan kedudukan keuangan atau operasi keuangan pemerintah daerah. Akuntansi keuangan daerah ialah unsur dari akuntansi sehingga akuntansi keuangan daerah pun memiliki tahap untuk mengidentifikasi, mengukur, mencatat, dan melaporkan transaksi keuangan di pemerintah daerah. Sistem yang baik dan terintegrasi akan memastikan bahwa setiap transaksi dicatat dengan benar dan sesuai dengan standar yang berlaku. Hal ini akan memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kualitas laporan keuangan juga sangat ditentukan oleh kompetensi sumber daya manusia, karena dengan sumber daya manusia yang kompeten, maka akan dihasilkan laporan keuangan yang tepat waktu, relevan, dan dapat dibandingkan (Mitjo et al., 2023; Moroki & Warbung, 2023). Hal ini karena kompetensi sumber daya manusia mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Kompetensi yang tinggi pada sumber daya manusia berkontribusi langsung pada produktivitas, efisiensi, dan kualitas hasil kerja (Kawulur, 2018). Kompetensi yang baik akan memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang lebih akurat, transparan, dan dapat dipercaya oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, peningkatan kompetensi sumber daya manusia merupakan langkah penting dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah.

Penggunaan teknologi informasi dalam proses akuntansi dan pelaporan keuangan dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kecepatan penyajian informasi keuangan. Teknologi informasi memungkinkan pengolahan data yang lebih cepat dan mengurangi risiko kesalahan manusia (Sakdiah et al., 2023). Dengan teknologi informasi, data dapat diolah dengan lebih efisien dan akurat, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan lebih cepat dan lebih dapat diandalkan.

Selain itu, teknologi informasi juga memungkinkan integrasi sistem yang lebih baik, sehingga memudahkan koordinasi antar departemen dan mempercepat proses pelaporan. Penggunaan perangkat lunak akuntansi yang canggih dapat membantu dalam otomatisasi berbagai tugas akuntansi, seperti pencatatan transaksi, penyusunan laporan, dan audit internal. Hal ini tidak hanya menghemat waktu dan biaya, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan. Dengan demikian, investasi dalam teknologi informasi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah.

Sejumlah penelitian telah dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian dari Ramdani dan Agustina (2022) menyatakan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan. Hal tersebut disebabkan karena standarisasi atau sistem dibuat untuk meningkatkan kinerja individu dan keseragaman dalam penyajian laporan keuangan, oleh karena itu ketika hasil (informasi/output) dari penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual tersebut memberikan manfaat kepada pengguna karena kesesuaian kebutuhan informasi.

Hasil penelitian Fiddin (2021) menunjukkan ditemukannya beberapa faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah salah satunya, kompetensi aparatur.

Menurut penelitian Samsiyah, Suharno, & Widarno (2022) kompetensi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sejalan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian Yamin (2021) pun menghasilkan kesimpulan bahwa kompetensi aparatur daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sementara penelitian dari Sakdiah et al. (2023) menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan karena dapat mempercepat proses pelaporan dan meminimalkan kesalahan.

Penelitian sebelumnya telah banyak mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas laporan keuangan di instansi pemerintah, seperti sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia, dan penerapan teknologi informasi. Penelitian ini menambah keunikan dengan fokus pada konteks spesifik yaitu Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Penelitian sebelumnya mungkin telah mengkaji topik serupa secara umum, namun lebih banyak menyoroti faktor-faktor umum seperti penerapan standar akuntansi dan penyajian laporan keuangan, serta kompetensi sumber daya manusia. Sementara penelitian ini secara khusus mengeksplorasi praktik akuntabilitas pelaporan keuangan di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Surakarta dan memperluas cakupan dengan menganalisis bagaimana integrasi sistem teknologi informasi dan sistem akuntansi keuangan daerah dapat berdampak positif pada akuntabilitas di lingkungan pemerintah daerah.

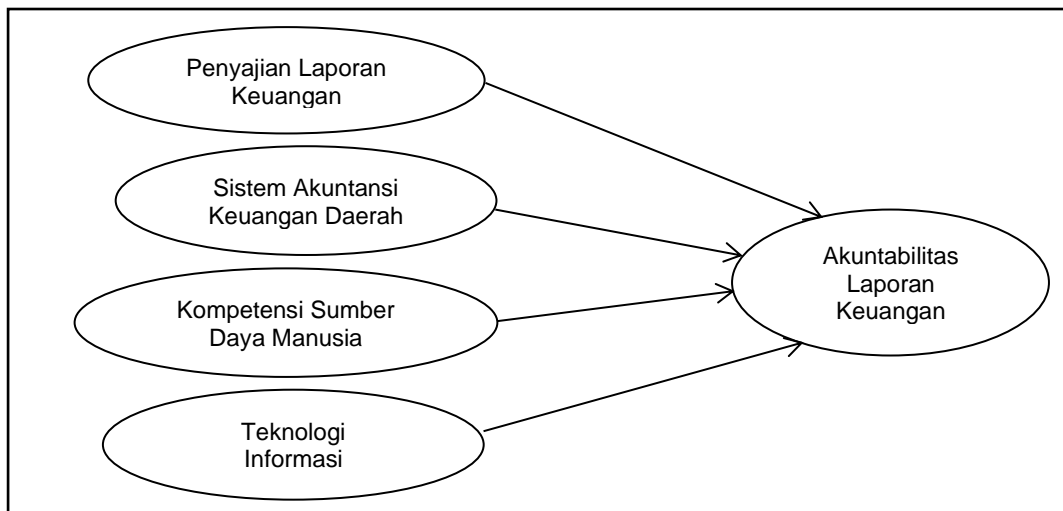
Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengonfirmasi temuan sebelumnya tetapi juga mengembangkan pemahaman baru yang spesifik terkait praktek akuntansi dan pelaporan keuangan di tingkat lokal, khususnya dalam konteks Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Hal ini diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan bagi pembaca mengenai strategi yang efektif dalam meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Pemilihan Dinas Kesehatan Kota Surakarta sebagai lokasi penelitian dipilih karena beberapa alasan strategis. Pertama, Surakarta adalah salah satu kota yang mewakili konteks urban dengan karakteristik administratif yang terstruktur, sehingga relevan untuk mempelajari implementasi otonomi daerah dalam konteks pengelolaan keuangan publik. Kedua, Dinas Kesehatan sebagai unit pelayanan publik vital memiliki tanggung jawab besar dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, yang menjadi fokus utama penelitian ini untuk mengevaluasi sejauh mana praktik akuntabilitas keuangan telah terimplementasi. Dengan demikian, pemilihan Surakarta sebagai lokasi penelitian di Dinas Kesehatan memungkinkan untuk mendapatkan gambaran yang representatif tentang tantangan dan keberhasilan dalam implementasi prinsip akuntabilitas dalam konteks pelayanan kesehatan publik.

Penelitian ini menggunakan teori agensi sebagai *grand theory*. Teori ini mendefinisikan hubungan antara prinsipal (pemilik) dan agen (manajemen), dimana agen diberi kepercayaan dan wewenang untuk mengatur, mengatur, dan mengelola beberapa jasa untuk kepentingannya. Teori keagenan ini muncul ketika terdapat hubungan kerja antara satu orang atau lebih. Prinsipal memberikan wewenang dan bekerja sama dengan orang lain (agen) untuk mendapatkan wewenang dalam menjalankan perusahaan. Agen harus melaporkan dan memberikan informasi kepada prinsipal karena agen lebih mengetahui kondisi perusahaan dibandingkan prinsipal (Salmato et al., 2023). Teori ini mengandung makna bahwa dinas kesehatan (agen) yang telah diberi amanah dan wewenang harus melaporkan kinerja dinas kesehatan secara akuntabel kepada pemerintah dan masyarakat. Selain itu, pemangku kepentingan sebagai pengguna informasi harus menyediakan informasi yang diperlukan secara menyeluruh untuk meminimalkan konflik dan asimetri informasi antara prinsipal dan agen. Terkait akuntabilitas laporan keuangan dinas kesehatan, pemerintah daerah akan terus

melakukan evaluasi agar dinas kesehatan dapat berkembang dan maju dengan pengelolaan yang baik dan benar.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penyajian laporan keuangan, sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia, dan teknologi informasi terhadap akuntabilitas laporan keuangan di Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas laporan keuangan, diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang tepat untuk perbaikan pengelolaan keuangan di Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Gambar 1 menunjukkan kerangka konseptual yang menjelaskan hubungan antar Variabel:



Gambar 1. Bagan Kerangka Konseptual

Penyajian Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Laporan Keuangan

Teori keagenan menjelaskan pihak agen perlu melakukan pertanggungjawaban dengan menyediakan laporan keuangan yang berkualitas agar dapat digunakan oleh *stakeholder*. Para *stakeholder* menganggap laporan keuangan merupakan alat yang penting untuk mengontrol pelaksanaan akuntabilitas dalam organisasi publik (Allisa & Suryaningrum, 2023). Sesuai dengan hasil penelitian terdahulu, Tran et al. (2021) menunjukkan laporan keuangan akan mendorong akuntabilitas dan memastikan transparansi jika informasi disajikan secara berkualitas. Semakin berkualitas penyajian laporan keuangan organisasi maka akan berdampak pada peningkatan akuntabilitas laporan keuangan organisasi. Penyajian laporan keuangan kualitas tinggi harus mencakup semua informasi yang relevan untuk menjamin akuntabilitas publik (Shadrina & Hidajat, 2023). Dengan demikian, dirumuskan hipotesis pertama dalam penelitian ini yaitu Penyajian laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Akuntabilitas Laporan Keuangan

Teori keagenan mengemukakan bahwa terdapat hubungan antara pihak yang memberi amanat (*principal*) dan pihak yang diberi amanat (*agent*), di mana pihak *agent* bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya dan melaporkan kinerjanya kepada pihak *principal*. Dalam konteks Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), teori ini relevan karena pemerintah daerah (sebagai *agent*) bertanggung jawab untuk mengelola dan melaporkan keuangan kepada masyarakat dan pemerintah pusat (sebagai *principal*). SAKD yang baik dan

terintegrasi memungkinkan pemerintah daerah untuk menyusun laporan keuangan yang akurat, transparan, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, sehingga meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan. Akuntabilitas ini penting untuk memastikan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya publik dan memenuhi harapan masyarakat serta otoritas yang lebih tinggi dalam hal transparansi dan kejujuran. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu dari Binawati (2022) dan Putra & Halmawati (2022) yang membuktikan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, dirumuskan hipotesis kedua dalam penelitian ini yaitu: Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan

Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Akuntabilitas Laporan Keuangan

Berdasarkan teori keagenan kompetensi sumber daya manusia terdapat hubungan dengan agen, dimana posisi selaku agen adalah pihak yang membuat atau mengelola laporan keuangan yang seharusnya mempunyai kompetensi sesuai yang dibutuhkan dalam proses pembuatan laporan keuangan, seperti menjalankan tugas sesuai dengan fungsi akuntansi, memahami peran dan fungsi dalam pengelolaan keuangan, mendapatkan pelatihan dalam penyusunan dan pembuatan laporan keuangan, serta jika perlu sudah mempunyai pengalaman di bidang akuntansi supaya dapat memudahkan dalam pembuatan laporan keuangan yang berkualitas dan akuntabel (Jayanti & Suardana, 2019).

Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akan mengurangi kesalahan dalam pembuatan laporan keuangan yang merupakan syarat dari laporan keuangan yang berkualitas. Upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkompeten untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas merupakan bentuk pertanggungjawaban pemegang amanah terhadap pemberi amanah. Hal ini sesuai dengan teori keagenan dalam sektor pemerintah yang memaknai akuntabilitas publik merupakan bentuk tanggungjawab penerima amanah atau agen terhadap pemberi amanah atau principal untuk memberikan, menyajikan informasi yang sesungguhnya (Ternalemta et al., 2021). Hal ini sejalan dengan penelitian dari Husna et al. (2022) bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, dirumuskan hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan.

Teknologi Informasi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Dalam pelaporan keuangan, pemerintah yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Dalam suatu pemerintahan demokrasi, hubungan antara pemerintah dan para pengguna informasi keuangan pemerintah dapat digambarkan sebagai suatu hubungan keagenan (*agency relationship*). Dalam hal ini pemerintah berfungsi sebagai agen yang diberi kewenangan untuk melaksanakan kewajiban tertentu yang ditentukan oleh para pengguna informasi keuangan pemerintah sebagai prinsipal, baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya. Dalam hubungan keagenan, pemerintah sebagai agen harus melaksanakan apa yang menjadi kepentingan para pengguna informasi

keuangan pemerintah sebagai prinsipalnya. Sejalan dengan penelitian dari Sakdiah et al (2023) bahwa teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan demikian, dirumuskan hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif untuk menganalisis pengaruh penyajian laporan keuangan, sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia, dan teknologi informasi terhadap akuntabilitas laporan keuangan di Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Populasi dalam penelitian ini adalah 66 karyawan yang terlibat dalam pengelolaan keuangan, yaitu bendahara, pejabat penatausahaan keuangan, dan pejabat pelaksana teknis kegiatan. Teknik sampling yang digunakan adalah sampling sensus, di mana seluruh anggota populasi dijadikan sampel karena jumlah populasi kurang dari 100.

Data primer diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner yang disusun dengan skala Likert. Skala ini berisi 5 tingkatan preferensi jawaban, antara lain: SS untuk jawaban sangat setuju dengan nilai 5, S untuk jawaban setuju dengan nilai 4, KS untuk jawaban kurang setuju dengan nilai 3, TS untuk jawaban tidak setuju dengan nilai 2, dan STS untuk jawaban sangat tidak setuju dengan nilai 1. Kuesioner tersebut mengukur persepsi responden terhadap penyajian laporan keuangan, sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia, teknologi informasi, dan akuntabilitas laporan keuangan.

Pengukuran akuntabilitas laporan keuangan dilakukan dengan indikator yang meliputi: kepatuhan terhadap regulasi, pertanggungjawaban kepada publik, keterbukaan informasi, keterlibatan dalam penyusunan anggaran, dan monitoring serta evaluasi kinerja keuangan (Hartaty & Maria, 2018). Penyajian laporan keuangan diukur dengan indikator meliputi relevansi, keandalan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010). Sistem akuntansi keuangan daerah diukur dengan indikator antara lain ketepatan waktu, fleksibilitas, efisiensi biaya, dan daya audit (Setiono, 2019). Kompetensi sumber daya manusia diukur dengan indikator yang meliputi pengembangan diri, profesionalisme, penguasaan teknologi, jenjang pendidikan, dan keahlian (Waruwu et al., 2023). Sedangkan teknologi informasi diukur dengan indikator yang meliputi perangkat keras, perangkat lunak, basis data, infrastruktur jaringan, dan dukungan teknis (Saufik, 2021).

Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan regresi linier berganda untuk untuk memprediksi seberapa besar pengaruh antar satu atau dua variabel bebas (independen) terhadap satu variabel terikat (dependen). Uji t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2018: 99).

Hasil dan Pembahasan

Hasil analisis statistik, diketahui skor terendah, tertinggi, rata-rata dan standar deviasi data. Berikut data statistik data penelitian. Pada tabel 1 di atas, skor terendah variable Akuntabilitas laporan keuangan sebesar 19, skor tertinggi 36. Rata-rata skor yang diperoleh adalah 28,98 dengan simpangan baku 3,64. Rentang skor yang mencakup 19 hingga 36 menunjukkan variasi dalam penilaian responden terhadap tingkat akuntabilitas dalam laporan keuangan. Rata-rata skor yang mendekati 28,98 mencerminkan nilai tengah dari semua penilaian tersebut, yang menunjukkan bahwa secara umum responden memberikan penilaian yang cukup tinggi terhadap akuntabilitas laporan keuangan. Simpangan baku yang cukup besar (3,64) mengindikasikan bahwa ada variasi yang signifikan dalam cara responden

menilai akuntabilitas laporan keuangan, dengan beberapa responden memberikan skor yang jauh di atas atau di bawah rata-rata. Hal ini menunjukkan bahwa ada keragaman dalam persepsi atau interpretasi terhadap akuntabilitas laporan keuangan di antara responden, yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pengalaman, pengetahuan, atau konteks spesifik masing-masing responden.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	Akuntabilitas laporan keuangan	Penyajian laporan keuangan	Sistem akuntansi keuangan daerah	Kompetensi sumber daya manusia	Teknologi informasi
Skor Terendah	19	18	22	17	24
Skor Tertinggi	36	32	32	36	36
Rata-rata	28,98	25,30	26,29	26,82	29,14
Standar Deviasi	3,64	2,90	3,06	4,19	2,98

Skor terendah variable Penyajian laporan keuangan sebesar 18, skor tertinggi 32. Rata-rata skor yang diperoleh adalah 25,30 dengan simpangan baku 2,90. Rentang skor yang mencakup 18 hingga 32 menunjukkan variasi dalam penilaian responden terhadap kualitas penyajian laporan keuangan. Rata-rata skor yang mendekati 25,30 mencerminkan nilai tengah dari semua penilaian tersebut, sementara simpangan baku yang relatif rendah (2,90) menunjukkan bahwa skor-skornya tidak terlalu jauh dari rata-rata, menunjukkan tingkat konsistensi dalam persepsi responden terhadap variabel ini. Dengan demikian, data ini memberikan gambaran tentang seberapa baik responden menilai penyajian laporan keuangan, dengan indikasi bahwa penilaian tersebut umumnya stabil dan tidak terlalu bervariasi secara signifikan dari nilai rata-rata.

Skor terendah variable Sistem akuntansi keuangan daerah sebesar 22, skor tertinggi 32. Rata-rata skor yang diperoleh adalah 26,29 dengan simpangan baku 3,06. Rentang skor dari 22 hingga 32 menunjukkan variasi dalam penilaian responden terhadap sistem akuntansi keuangan daerah, dengan rata-rata skor yang mendekati 26,29 mencerminkan nilai tengah dari semua penilaian tersebut. Simpangan baku yang relatif moderat (3,06) mengindikasikan bahwa ada variasi yang cukup signifikan dalam skor-skornya dari nilai rata-rata, menunjukkan adanya perbedaan persepsi di antara responden terkait dengan kualitas sistem akuntansi keuangan daerah. Dengan demikian, hasil ini memberikan gambaran bahwa meskipun rata-rata penilaian cukup baik, ada keragaman dalam bagaimana responden menilai sistem akuntansi keuangan daerah, yang dapat mencerminkan berbagai pengalaman dan perspektif yang berbeda dari masing-masing responden.

Skor terendah variable Kompetensi sumber daya manusia sebesar 17, skor tertinggi 36. Rata-rata skor yang diperoleh adalah 26,82 dengan simpangan baku 4,19. Rentang skor yang luas dari 17 hingga 36 menunjukkan variasi yang signifikan dalam penilaian responden terhadap kompetensi sumber daya manusia. Rata-rata skor yang mendekati 26,82 mencerminkan nilai tengah dari semua penilaian tersebut, sementara simpangan baku yang tinggi (4,19) mengindikasikan bahwa ada variasi yang cukup besar dalam skor-skornya dari nilai rata-rata. Hal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan dalam cara responden menilai kompetensi sumber daya manusia, yang dapat mencerminkan berbagai pandangan atau pengalaman yang berbeda terkait dengan aspek-aspek spesifik dari kompetensi sumber daya manusia yang dinilai.

Skor terendah variable Teknologi informasi (X4) sebesar 24, skor tertinggi 36. Rata-rata skor yang diperoleh adalah 29,14 dengan simpangan baku 2,98. Rentang skor yang luas dari

24 hingga 36 menunjukkan variasi dalam penilaian responden terhadap implementasi dan penggunaan teknologi informasi. Rata-rata skor yang mendekati 29,14 mencerminkan nilai tengah dari semua penilaian tersebut, yang secara umum menunjukkan adanya persepsi positif terhadap status teknologi informasi dalam konteks yang dinilai. Simpangan baku yang relatif rendah (2,98) mengindikasikan bahwa sebagian besar responden cenderung memberikan penilaian yang konsisten terhadap variabel ini, dengan variasi yang tidak terlalu signifikan dari rata-rata. Hal ini menunjukkan bahwa, secara keseluruhan, implementasi dan kualitas teknologi informasi dalam konteks yang dinilai cukup stabil dan dilihat positif oleh responden.

Kuesioner yang digunakan sebagai instrumen penelitian terlebih dahulu dilakukan uji instrumen. Uji yang pertama adalah uji validitas. Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan, maka hasil pengujian validitas ditunjukkan dalam Tabel 2 di bawah ini:

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Variabel	Butir dalam kuesioner	Koefisien korelasi	Nilai Kritis (r-tabel) $\alpha=5\%$; $N-2=66-2$	Keterangan
Penyajian Laporan Keuangan	X1.1	0,737	0,242	Valid
	X1.2	0,659	0,242	Valid
	X1.3	0,742	0,242	Valid
	X1.4	0,814	0,242	Valid
	X1.5	0,794	0,242	Valid
	X1.6	0,768	0,242	Valid
	X1.7	0,757	0,242	Valid
	X1.8	0,838	0,242	Valid
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	X2.1	0,687	0,242	Valid
	X2.2	0,813	0,242	Valid
	X2.3	0,860	0,242	Valid
	X2.4	0,817	0,242	Valid
	X2.5	0,798	0,242	Valid
	X2.6	0,816	0,242	Valid
	X2.7	0,804	0,242	Valid
	X2.8	0,860	0,242	Valid
Kompetensi Sumber Daya Manusia	X3.1	0,683	0,242	Valid
	X3.2	0,760	0,242	Valid
	X3.3	0,864	0,242	Valid
	X3.4	0,847	0,242	Valid
	X3.5	0,725	0,242	Valid
	X3.6	0,690	0,242	Valid
	X3.7	0,559	0,242	Valid
	X3.8	0,508	0,242	Valid
	X3.9	0,552	0,242	Valid
Teknologi Informasi	X4.1	0,545	0,242	Valid
	X4.2	0,689	0,242	Valid
	X4.3	0,798	0,242	Valid
	X4.4	0,795	0,242	Valid
	X4.5	0,765	0,242	Valid
	X4.6	0,672	0,242	Valid
	X4.7	0,649	0,242	Valid

Variabel	Butir dalam kuesioner	Koefisien korelasi	Nilai Kritis (r-tabel) $\alpha=5\%$; $N-2=66-2$	Keterangan
Akuntabilitas Laporan Keuangan	X4.8	0,443	0,242	Valid
	X4.9	0,625	0,242	Valid
	Y.1	0,737	0,242	Valid
	Y.2	0,820	0,242	Valid
	Y.3	0,847	0,242	Valid
	Y.4	0,814	0,242	Valid
	Y.5	0,794	0,242	Valid
	Y.6	0,768	0,242	Valid
	Y.7	0,827	0,242	Valid
	Y.8	0,826	0,242	Valid
	Y.9	0,737	0,242	Valid

Sumber: Data primer diolah (2024)

Hasil pengujian validitas yang ditunjukkan pada tabel dapat dijelaskan bahwa seluruh item pernyataan variabel penelitian memiliki nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$, pada taraf signifikansi 95% (= 0,05) dan $n = 66$, dimana $r_{tabel} = 0,242$. Hal ini bisa disimpulkan bahwa seluruh item variabel penelitian valid untuk dijadikan instrumen dalam penelitian atau pernyataan yang diajukan dapat digunakan untuk mengukur variabel yang diteliti.

Uji instrumen yang kedua adalah uji reliabilitas. Tabel 3 merupakan hasil uji reliabilitas dengan menggunakan perhitungan SPSS 23:

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Jumlah Soal	Keterangan
1	Penyajian Laporan Keuangan	0,895	8	Reliabel
2	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	0,922	8	Reliabel
3	Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,863	9	Reliabel
4	Teknologi Informasi	0,833	9	Reliabel
5	Akuntabilitas Laporan Keuangan	0,927	9	Reliabel

Sumber: Data primer diolah (2024)

Hasil uji reliabilitas pada tabel 3 menunjukkan instrumen dinyatakan valid karena memiliki nilai *Cronbach's Alpha* lebih dari 0,6. Dengan demikian seluruh kuesioner dapat digunakan sebagai alat pengumpul data. Sebelum dilakukan uji hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik. Yang pertama adalah uji normalitas, dari hasil uji normalitas diketahui bahwa nilai $Asymp\ sig > 0,05$ maka bisa dinyatakan bahwa data berdistribusi normal. Selanjutnya dilakukan uji multikolinieritas menunjukkan nilai VIF di bawah 10 dan *tolerance value* diatas 0,10, sehingga dapat disimpulkan bahwa model tersebut bebas dari multikolinearitas. Hasil pengujian heteroskedastisitas mempunyai nilai $sig. 2-tailed > 0,05$ atau memiliki nilai signifikansi di atas 0,05. Sehingga dapat disimpulkan model regresi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Tabel 4. Uji Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-3,662	0,805		-4,546	0,000
Penyajian laporan keuangan	0,726	0,071	0,579	10,159	0,000
Sistem akuntansi keuangan daerah	0,069	0,035	0,058	1,968	0,054
Kompetensi sumber daya manusia	0,096	0,029	0,118	3,300	0,002
Teknologi informasi	0,338	0,068	0,287	4,995	0,000
F				514,615	0,000
Adjusted R Square				0,969	

Berdasarkan hasil uji hipotesis dari tabel 4, variabel Penyajian Laporan Keuangan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Teknologi Informasi secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan. Hal ini terbukti dari nilai t hitung yang masing-masing lebih besar dari nilai t tabel, dengan tingkat signifikansi yang kurang dari 0,05 untuk setiap variabelnya. Artinya, masing-masing dari empat faktor tersebut memiliki kontribusi yang penting dalam meningkatkan atau mempengaruhi tingkat akuntabilitas laporan keuangan.

Nilai R² (R Square) sebesar 0,969 atau (96,9%), hal ini menunjukkan variabel akuntabilitas laporan keuangan dapat dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel penyajian laporan keuangan, sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia, dan teknologi informasi sebesar 96,9%, sedangkan sisanya sebesar 2,9% dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan

Hasil analisis tabel 4 (Uji Regresi Berganda) diketahui bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan. Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Sweetenia *et al* (2019), Nurfadilah & Santoso (2022), Paramayana *et al.* (2022), dan Susilawati *et al.* (2022) yang menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan.

Penyajian laporan keuangan yang baik memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan. Artinya, bagaimana laporan keuangan disusun dan disajikan akan berdampak langsung pada sejauh mana laporan tersebut dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Jika laporan keuangan disajikan secara jelas, transparan, dan tepat waktu, maka para pemangku kepentingan akan lebih mudah untuk memahami, memeriksa, dan mengevaluasi kinerja keuangan organisasi. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan publik dan para pemangku kepentingan terhadap laporan keuangan tersebut.

Selain itu, penyajian laporan keuangan yang relevan dan andal akan memastikan bahwa informasi yang disampaikan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang tepat. Laporan keuangan yang disajikan dengan baik memberikan gambaran yang akurat mengenai kondisi keuangan organisasi, sehingga memudahkan para pengambil keputusan untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi aktivitas keuangan. Ketika laporan keuangan disajikan dengan cara yang dapat dibandingkan dan mudah dipahami, ini juga membantu dalam menilai kinerja dari waktu ke waktu dan membandingkannya dengan standar atau benchmark yang ada.

Akuntabilitas laporan keuangan juga terkait erat dengan bagaimana laporan tersebut dapat diaudit dan diverifikasi. Penyajian laporan keuangan yang memadai akan menyediakan jejak audit yang jelas, yang memungkinkan auditor untuk melakukan pemeriksaan secara efektif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua transaksi keuangan telah dicatat dan dilaporkan dengan benar. Ketika laporan keuangan dapat diaudit dengan baik, ini akan meningkatkan akuntabilitas dan memastikan bahwa organisasi bertanggung jawab atas pengelolaan dana dan sumber daya yang dimilikinya. Dengan demikian, penyajian laporan keuangan yang baik adalah fondasi penting bagi akuntabilitas keuangan yang kuat.

Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan

Hasil analisis tabel 4 (Uji Regresi Berganda) diketahui bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan. Temuan penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian dari Ramdani & Agustina (2022), Husna *et al.* (2022), Binawati & Nindyaningsih (2022), dan Sedana & Putra (2023) yang mengungkapkan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Sistem akuntansi keuangan daerah yang baik memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Artinya, bagaimana sistem ini dirancang dan dioperasikan akan berdampak langsung pada keakuratan, keandalan, dan relevansi informasi keuangan yang disajikan. Sistem yang efektif akan memastikan bahwa semua transaksi keuangan dicatat dengan benar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Dengan demikian, laporan keuangan yang dihasilkan akan memberikan gambaran yang tepat tentang kondisi keuangan daerah tersebut.

Fungsi dan manfaat dari sebuah system akuntansi keuangan daerah berkaitan dengan validnya data yang dihasilkan sehingga mempengaruhi laporan keuangan yang dihasilkan dalam sebuah system untuk menghasilkan laporan keuangan yang digunakan karena berhubungan dengan kualitas dari laporan keuangan yang merupakan dasar pengambilan keputusan (Sumampouw & Miran, 2023).

Sistem akuntansi yang efisien akan meningkatkan ketepatan waktu dalam penyusunan laporan keuangan. Ketika data keuangan dapat diolah dengan cepat dan tepat, laporan keuangan dapat disajikan tepat waktu untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan. Hal ini sangat penting karena informasi keuangan yang disajikan tepat waktu dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang cepat dan tepat, baik oleh pemerintah daerah, legislatif, maupun oleh masyarakat luas yang berkepentingan.

Sistem akuntansi keuangan daerah yang baik juga akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya sistem yang terstruktur dan terdokumentasi dengan baik, proses audit dan pengawasan keuangan akan menjadi lebih mudah dan efektif. Auditor akan dapat memverifikasi dan memastikan bahwa semua laporan keuangan mencerminkan transaksi yang sebenarnya. Transparansi ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah dan memastikan bahwa dana publik digunakan secara efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat.

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan

Hasil tabel 4 (Uji Regresi Berganda) diketahui bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Paramarta & Ariyanto (2021); Susanti, *et al.* (2022); Sakdiah *et al.* (2023), dan Karyadi (2020) yang menyimpulkan kompetensi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun, hasil penelitian ini

bertolak belakang dengan temuan penelitian dari Animah *et al.* (2020) yang membuktikan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang baik memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Artinya, tingkat keterampilan, pengetahuan, dan profesionalisme dari individu yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan akan menentukan seberapa akurat, andal, dan relevan informasi keuangan yang disajikan. SDM yang kompeten akan memastikan bahwa setiap transaksi keuangan dicatat dan dilaporkan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya.

SDM yang terus mengembangkan diri dan meningkatkan keahliannya akan mampu mengikuti perubahan dan perkembangan dalam dunia akuntansi dan keuangan. Mereka akan lebih siap menghadapi tantangan baru, seperti perubahan regulasi atau implementasi teknologi baru, yang dapat mempengaruhi penyusunan laporan keuangan. Dengan kompetensi yang terus diperbarui, SDM dapat memastikan bahwa laporan keuangan tidak hanya memenuhi standar yang berlaku, tetapi juga relevan dan informatif bagi pengambilan keputusan. Dengan demikian, kualitas laporan keuangan sangat bergantung pada kompetensi SDM yang terlibat dalam proses penyusunannya.

SDM yang memiliki pendidikan yang memadai dan pengalaman yang relevan dalam bidang akuntansi dan keuangan juga mampu mengenali dan menangani masalah-masalah yang mungkin muncul selama proses penyusunan laporan keuangan. Mereka akan lebih cermat dalam memeriksa kesalahan atau ketidaksesuaian dalam pencatatan transaksi keuangan, sehingga dapat mengurangi risiko kesalahan dalam laporan keuangan. Keterampilan analitis dan kritis yang dimiliki oleh SDM yang kompeten akan meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan memastikan bahwa semua informasi yang disajikan akurat dan sesuai dengan kenyataan.

Selain itu, profesionalisme SDM dalam menjalankan tugas-tugasnya akan mempengaruhi integritas laporan keuangan. SDM yang profesional akan menjalankan tugas dengan etika yang tinggi, tidak memihak, dan bertanggung jawab atas pekerjaannya. Mereka akan menjaga kerahasiaan informasi, menghindari konflik kepentingan, dan bertindak sesuai dengan kode etik profesi akuntansi. Sikap profesional ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap laporan keuangan yang dihasilkan.

Dengan demikian, kompetensi SDM memainkan peran yang sangat krusial dalam memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas tinggi. SDM yang terampil, berpengetahuan, dan profesional akan mampu menghasilkan laporan keuangan yang akurat, andal, dan relevan, sehingga mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, investasi dalam pengembangan kompetensi SDM adalah langkah penting yang harus dilakukan oleh organisasi untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan mereka.

Pengaruh Teknologi informasi terhadap Akuntabilitas laporan keuangan

Hasil analisis tabel 4 (Uji Regresi Berganda) diketahui bahwa teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan. Temuan penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian dari Ramadhani *et al.* (2019), Binawati & Nindyaningsih (2022), dan Sakdiah *et al.* (2023) yang menyatakan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun, hasil penelitian ini bertolak belakang dengan temuan penelitian dari Karyadi (2020) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan desa.

Teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan mengindikasikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penyusunan, pengelolaan, dan pelaporan laporan keuangan memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap tingkat akuntabilitas laporan keuangan. Ini berarti bahwa penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan kualitas, keakuratan, dan transparansi laporan keuangan, sehingga membuatnya lebih dapat dipercaya oleh para pemangku kepentingan.

Penerapan teknologi informasi dalam sistem akuntansi keuangan dapat memungkinkan otomatisasi proses, pengolahan data yang lebih cepat dan akurat, serta pengendalian yang lebih baik terhadap keamanan dan integritas informasi keuangan. Dengan demikian, hal ini dapat mengurangi risiko kesalahan manusia dan kecurangan, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pelaporan keuangan secara keseluruhan.

Lebih jauh lagi, teknologi informasi juga dapat memfasilitasi akses yang lebih mudah dan cepat terhadap informasi keuangan bagi para pemangku kepentingan, seperti investor, regulator, dan masyarakat umum. Dengan demikian, meningkatnya transparansi dan keterbukaan informasi keuangan dapat memberikan kontribusi positif terhadap persepsi dan kepercayaan terhadap akuntabilitas entitas yang bersangkutan.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan penelitian ini, yaitu penyajian laporan keuangan, sistem akuntansi, sumber daya manusia, teknologi informasi yang baik dapat meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan. Ini berarti bahwa jika penyajian laporan keuangan, sistem akuntansi, sumber daya manusia, dan teknologi informasi dikelola dengan baik dan efektif, maka hal tersebut akan menyebabkan peningkatan dalam tingkat akuntabilitas laporan keuangan. Dengan kata lain, aspek-aspek tersebut berperan penting dalam memastikan transparansi dan keandalan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan suatu entitas.

Implikasi teoritis penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa faktor-faktor ini tidak hanya berperan sebagai pendukung, tetapi juga sebagai fondasi utama untuk memastikan integritas dan kualitas informasi keuangan. Secara praktis, temuan ini memberikan panduan yang jelas bagi organisasi untuk meningkatkan proses penyajian laporan keuangan, mengoptimalkan sistem akuntansi, mengembangkan SDM, dan memanfaatkan teknologi informasi dengan lebih efektif, sehingga meningkatkan transparansi, keandalan, dan kepercayaan *stakeholders* terhadap laporan keuangan mereka.

Keterbatasan penelitian terkait pengumpulan data melalui kuesioner adalah masih adanya kelemahan-kelemahan seperti jawaban yang kurang cermat dan responden yang menjawab dengan kondisi yang kurang fokus. Penelitian ini juga masih terbatas pada akses data populasi yang dituju dalam upaya pemenuhan teknik pengambilan sample yang menggunakan sampling sensus, namun dikarenakan sangat ketatnya peraturan dan regulasi yang berlaku di Dinas Kesehatan Kota Surakarta, sehingga waktu penyelesaian banyak dipengaruhi kebijakan dari lokasi penelitian.

Peneliti dapat melakukan penelitian lebih lanjut untuk mendalami faktor-faktor lain yang juga dapat berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan di sektor kesehatan. Misalnya, penelitian lebih lanjut tentang dampak regulasi keuangan yang baru, faktor-faktor budaya organisasi, atau strategi pengelolaan risiko terhadap akuntabilitas laporan keuangan. Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam dan kontribusi yang berarti dalam meningkatkan praktik akuntabilitas di Dinas Kesehatan dan sektor kesehatan secara keseluruhan.

Daftar Pustaka

- Allisa, S., & Suryaningrum, D. H. (2023). Peran Akuntabilitas Pada Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Kinerja Organisasi Sektor Publik. *Jurnal EMA*, 8(2), 170–178. <https://doi.org/10.51213/ema.v8i2.383>
- Animah, A., Suryantara, A. B., & Astuti, W. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 5(1), 99–109. <https://doi.org/10.29303/jaa.v5i1.93>
- Azizah, S. N., & Anik, S. (2023). Dampak Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (SKPD Kota Semarang). *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, 2(3), 53–68.
- Bangsawan, A. A., & Abbas, A. (2021). Efek Pelanggaran Standar Akuntansi Pemerintahan dan Ketidakpatuhan Peraturan terhadap Opini Audit Laporan Keuangan di Sulawesi Selatan. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(02), 461–472. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1481>
- Binawati, E., & Nindyaningsih, C. T. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Dinas-Dinas SKPD di Kabupaten Klat. *OPTIMAL (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Aktual STIE IEU Yogyakarta)*, 19(1), 19–39.
- Dewi, N. F. (2023). Determinan Akuntabilitas Keuangan Dengan Kualitas Informasi Laporan Keuangan Sebagai Variabel Intervening Pada Badan Keuangan Daerah Kota Depok. *JAMER : Jurnal Akuntansi Merdeka*, 4(2), 84–91. <https://doi.org/10.33319/jamer.v4i2.103>
- Fiddin, F. (2021). Akuntabilitas Keuangan dan Kompetensi Aparatur Sipil Negera Terhadap Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan Perindustrian Kota Pekanbaru. *Magisma: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 9(1), 63–70. <https://doi.org/10.35829/magisma.v9i1.145>
- Firmansyah, A., Yuniar, M. R., & Arfiansyah, Z. (2022). Kualitas Laporan Keuangan di Indonesia: Transparansi Informasi Keuangan dan Karakteristik Pemerintah Daerah. *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)*, 4(2), 181–197. <https://doi.org/10.33827/akurasi2022.vol4.iss2.art180>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hartaty, S., & Maria, M. (2018). Determinan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 2(1), 82–90. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3840763>
- Husna, A., Maryam, M., & Ikhbar, S. (2022). Pengaruh Kompetensi Pengelolaan Keuangan Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar. *Serambi Konstruktivitis*, 4(2), 206–214. <https://doi.org/10.32672/konstruktivitis.v4i2.4704>
- Jayanti, L. S. I. D., & Suardana, K. A. (2019). Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas, Whistleblowing dan SPI Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 29(3), 1117–1131. <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v29.i03.p16>
- Jesni, J., Konde, Y. T., & Setiawati, L. (2022). Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM)*, 7(3), 1–10. <https://doi.org/10.29264/jiam.v7i2.7879>
- Karyadi, M. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas keuangan Desa (Studi di

- Kecamatan Aikmel dan Kecamatan Lenek Tahun 2018). *Journal Ilmiah Rinjani: Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani*, 7(2), 34–46. <https://doi.org/10.12345/jir.v7i2.123>
- Kawulur, H. R. (2018). Analisis Kinerja Sumber Daya Manusia di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Manado (Studi pada Tenaga Edukatif). *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 2(2).
- Kornitasari, Y. (2023). Sosialisasi Laporan Keuangan PMI Kabupaten Blitar: Transparan, Akuntabel dan Kepercayaan Publik. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(03), 288–296. <https://doi.org/10.25134/empowerment.v6i03.8742>
- Mitjo, F., Kawatu, F. S., & Tangkau, J. (2023). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 3(2), 234–241. <https://doi.org/10.53682/jaim.v3i2.2616>
- Molle, S. S., Manafe, H. A., & Perseveranda, M. E. (2023). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Dan Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Keuangan Daerah). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 4(3), 348–356. <https://doi.org/10.31933/jimt.v4i3.1332>
- Moroki, F. O., & Warbung, S. (2023). Analisis Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor BPKPD Kota Tomohon. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 4(3), 630–641. <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.4769>
- Nasution, M. S. (2019). *BPK ungkap sejumlah temuan di laporan keuangan Pemda Sumbar*. Antara News. <https://www.antaraneews.com/berita/845900/bpk-ungkap-sejumlah-temuan-di-laporan-keuangan-pemda-sumbar>
- Nurfadilah, Y., & Santoso, S. (2022). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar. *Surakarta Accounting Review (SAREV)*, 4(2), 99–111.
- Ohoiwai, R. R., Marunduh, A., & Pesak, P. J. (2022). Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Tenggara. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 3(3), 407–413. <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.3191>
- Pandaleke, O. T., Meggy, T. E., & Kawulur, H. (2022). Analisis Arus Kas Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada PT. Mutiara Multi Finance: Pada PT. Mutiara Multi Finance. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 3(1), 23–28. <https://doi.org/10.53682/jaim.v3i1.1183>
- Paramarta, I. W. A., & Ariyanto, D. (2021). Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah dengan Kualitas Informasi sebagai Variabel Mediasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(5), 1097–1109. <https://doi.org/10.24843/EJA.2021.v31.i05.p03>
- Paramayana, A. N., Dewi, R. R., & Astungkara, A. (2022). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas, dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Owner*, 6(4), 4108–4112. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1070>
- Putra, R. I., & Halmawati, H. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Komitmen Organisasi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 4(3), 589–597. <https://doi.org/10.24036/jea.v4i3.479>
- Ramadhani, M., Soerono, A. N., & Mulyasari, W. (2019). Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Teknologi Informasi, dan Pemahaman Basis Akrua Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten). *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 12(1), 40–63.

- <https://doi.org/10.35448/jrat.v12i1.5244>
- Ramdani, E., & Agustina, N. (2022). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara. *JAKTABANGUN: Jurnal Akuntansi dan Pembangunan*, 5(1), 1–10. <https://doi.org/10.56857/jaktabangun.v5i1.80>
- Rante, I., Salle, A., & Marlissa, E. R. (2018). Analisis terhadap Pemberian Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 3(2), 1–12. <https://doi.org/10.31957/keuda.v3i2.705>
- Sakdiah, A. A., Aiyub, A., & Adnan, A. (2023). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Desa di Kec.Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara). *J-MIND (Jurnal Manajemen Indonesia)*, 7(2), 116–130. <https://doi.org/10.29103/j-mind.v7i2.8198>
- Salmato, Lestari, B. A. H., & Jumaidi, L. T. (2023). Performance Accountability Financial Reports of Saving and Loan Cooperatives in East Lombok (Study on KSUSPPS Bina Al-Mandiri Syaria'ah). *International Journal of Business and Applied Economics*, 2(4), 639–650. <https://doi.org/10.55927/ijbae.v2i4.5248>
- Samsiyah, R. D., Suharno, S., & Widarno, B. (2022). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Kompetensi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sragen). *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 16(4), 180–188. <https://doi.org/10.33061/jasti.v16i4.6235>
- Saufik, I. (2021). *Pengantar Teknologi Informasi: Konsep, Teori dan Praktik*. Yayasan Prima Agus Teknik.
- Sedana, I. D., & Putra, I. M. E. (2023). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Keuangan Desa, Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kota Denpasar. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 4(1), 114–123. <https://doi.org/10.32795/hak.v4i1.3092>
- Setiono, E. P. (2019). *Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (Survei Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung)*. Bandung: Universitas Komputer Indonesia.
- Shadrina, H. N., & Hidajat, S. (2023). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(1), 459–466. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i1.873>
- Sukran, Rajindra, & Yusuf, D. (2020). Analisis Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 3(8), 421–429. <https://doi.org/10.56338/jks.v3i8.1753>
- Sumampouw, O., & Miran, M. (2023). Pengaruh Dukungan Atasan, Peran Konflik Afektif dan Akuntabilitas Terhadap Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 4(3), 707–714. <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.7422>
- Susanti, S., Basri, Y. M., & Rasuli, M. (2022). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pendampingan Desa dan Pemantauan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, Pemanfaatan Teknologi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Desa-Desa di Kabupaten Siak Provinsi Riau). *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 6(2), 254–277. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7267552>
- Susilawati, M., Malikhah, A., & Mawardi, M. C. (2022). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan

- Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan (Kota Malang dan Kabupaten Malang). *E-JRA: e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 11(5), 13–21.
- Sweetenia, A. M., Caesari, E. P. A., Aprillia, A. F., & Purwantini, A. H. (2019). Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, 17(1), 44–56. <https://doi.org/10.31603/bisnisekonomi.v17i1.2752>
- Ternalemta, T., Kalangi, L., & Tinangon, J. J. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 12(1), 38–50. <https://doi.org/10.35800/jjs.v12i1.32359>
- Tran, Y. T., Nguyen, N. P., & Hoang, T. C. (2021). The Role of Accountability in Determining the Relationship Between Financial Reporting Quality and the Performance of Public Organizations: Evidence from Vietnam. *Journal of Accounting and Public Policy*, 40(1), 106801. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2020.106801>
- Waruwu, E., Hulu, F., Mendrofa, Y., & Halawa, O. (2023). Analisis Kompetensi Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Di Kantor Camat Mandrehe Kabupaten Nias Barat. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 10468–10477. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i5.6126>
- Wonar, A. S. H. T. S. K. (2022). Menilai Pemberian Opini Wajar Tanpa Pengecualian Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah)*, 7(1), 1–24. <https://doi.org/10.52062/keuda.v7i1.2137>
- Yamin, M. (2021). Pengaruh Kompetensi Aparatur Dan Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Survei Pada Dinas Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan). *AL-IQTISHAD: Jurnal Ekonomi*, 12(2), 236–257. <https://doi.org/10.30863/aliqtishad.v12i2.1759>